

Negara, Pasar dan Masyarakat: Perspektif Ekonomi Politik Islam

FAROUK ABDULLAH ALWYNI



FAROUK ABDULLAH ALWYNI, SE, MA, MBA
*Presiden Direktur pada PT Alwyni
International Capital (AIC)*

Perdebatan yang paling sengit dalam sistem ekonomi selalu berujung pada perdebatan mengenai posisi negara, pasar dan masyarakat dan bagaimana peran dan hubungan antar masing-masing lembaga-lembaga tersebut. Sejauh ini, telah muncul berbagai varian sistem ekonomi yang memiliki sikapnya sendiri: mulai dari sistem liberalisme klasik, kapitalisme, sosialisme, komunisme, sistem negara kesejahteraan, hingga neo liberalisme. Indonesia sendiri telah mencoba eksperimen sosialisme (meskipun dengan jargon sosialisme Pancasila), kapitalisme, dan neo liberalisme. Sayang sekali belum pernah dicoba eksperimen sistem yang dipandu oleh Islam—meskipun hal itu cukup memungkinkan, tidak hanya karena mengingat Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, tapi juga perkembangan teoritik dan eksperimen sistem ekonomi Islam yang belakangan semakin berkembang di berbagai negara.

Mengupas bagaimana sudut pandang Islam terkait narasi besar Negara, Pasar dan Masyarakat, berikut kami turunkan wawancara dengan Farouk Abdullah Alwyni. Farouk Abdullah Alwyni adalah seorang praktisi keuangan Syariah yang juga sekaligus pemikir Ekonomi Politik Islam yang sebelumnya lama bekerja di kantor pusat *Islamic Development Bank (IDB)* di Jeddah, Saudi Arabia.

Apa pendapat Anda dengan ‘free market capitalism’?

Kalau kita baca ini (sambil menunjukkan sebuah buku), dalam sistem kapitalisme pasar bebas (*free market capitalism*) itu sendiri tidak ada yang namanya pemerintah tidak berperan sama sekali. Dalam konsep ‘modern free market’, peranan pemerintah tetap penting seperti misalnya penegakkan ‘rule of law’, penciptaan ‘public service’ yang baik dan melayani, memastikan akses masyarakat ke pendidikan dan kesehatan. Peranan pemerintah yang se-

perti ini adalah *'minimum requirements'* bagi berfungsinya sebuah sistem kapitalisme pasar bebas. Jadinya kalau sampai peranan pemerintah tidak ada sama sekali, itu namanya sistem ekonomi tidak jelas, tidak mungkin itu, yang bahkan mungkin bisa masuk kategori 'negara gagal.' Buku (*Capitalism at Risk: Rethinking the Role of Business* oleh Joseph L. Bower, Herman B. Leonard, dan Lynn S. Paine) ini yang berdasarkan diskusi-diskusi dengan para pemimpin bisnis dunia membahas peranan negara dan bisnis dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial global yang dianggap dapat membahayakan sistem 'free market capitalism' itu sendiri jika tidak dihadapi dengan baik. Ancaman-ancaman yang dapat membahayakan 'free market capitalism' itu sendiri di antaranya adalah sistem keuangan internasional, perdagangan internasional, ketidakmerataan, migrasi, kerusakan lingkungan, kegagalan aturan hukum, kondisi kesehatan dan pendidikan masyarakat, dan tumbuhnya kapitalisme negara. Buku ini pada dasarnya mencoba memposisikan peran bisnis dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Apakah bisnis itu berperan sebagai penonton saja dan menyerahkan segalanya kepada pemerintah (*Business as Bystander: Leaving Solutions to the Government*), atau apakah bisnis sebagai aktivis yang akan mengarahkan kebijakan pemerintah untuk perbaikan (*Business as Activist: Shaping & Promoting Government Policies*), atau bisnis sebagai inovator yang berusaha menjadi bagian dalam penyelesaian persoalan-persoalan global (*Business as Innovator: Addressing Challenges Directly*), atau bisnis sebagai pelopor dalam memberikan solusi melalui inovasi dan aktivisme (*Business as Leader: Forging Solutions Through Innovation and Activism*). Dari berbagai pemikiran dalam memposisikan bisnis di atas, dari perspektif Islam, tentunya adalah menciptakan bisnis yang seimbang, yang dapat menggabungkan antara profitabilitas dan

peran sosialnya, yakni ikut berperan juga terhadap perbaikan lingkungannya secara keseluruhan. Dalam artian, ada tanggung jawab moral dan sosialnya, ada etika, ada halal haram. Di sini bisnis mengkaji apakah yang dilakukannya berdampak negatif ataukah positif. Kalau negatif, dalam konteks itu (Islam), tentunya tidak bisa.

Apabila kerusakan lingkungan terjadi atau perusahaan membuat produk-produk yang merusak, sahkah pemerintah mengambil tindakan kepada perusahaan bersangkutan?

Tentu saja pemerintah sah mengambil tindakan. Dia (pemerintah) kan sebagai pemain utama dalam menentukan aturan main dan hukum-hukum yang ada, sebagai penjaga dan pengawal 'rule of law', sebagai 'the force for good.' Contohnya dalam kasus seperti pembuangan limbah, kalau sampai beracun bagi masyarakat sekitar, itu memerlukan peranan pemerintah *kan*. Kalau didiamkan sama sekali akan sangat berakibat negatif terhadap masyarakat.

Secara konseptual antara sistem konvensional dan Islam, sama. Dalam sistem konvensional kan ada AMDAL. Lalu apa yang spesifik dari ekonomi politik Islam kalau begitu?

Kalau saya melihat, ekonomi politik Islam tidak harus total kembali pada konsep praktis awal yang mengarah kepada 'reinventing the wheel.' Tidak seluruhnya harus seperti ini dan diganti ulang. Kalau hal-hal yang sudah ada tidak bertentangan dan sudah sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam, kan tetap bisa terpakai. Seperti etika bisnis, ada tradisi-tradisi yang kalau tidak bertentangan, tetap bisa dipakai. Saya pikir ada nilai-nilai yang memang universal. Itu saya pikir tetap akan terakomodasi, yang penting paradigma dasarnya.

Tadi dikatakan nilai-nilai yang baik dari sistem lama bisa diakomodir. Kalau begitu kira-kira lebih bagus mana, mengganti sistem yang sekarang dengan

sistem ekonomi Islam tapi mengakomodir nilai-nilai dari sistem sebelumnya, atau tetap mempertahankan sistem yang sekarang, namun memperjuangkan konsep dan nilai-nilai Islam ke dalam sistem yang sekarang, lewat mekanisme sistem sekarang yang memang memungkinkan kita untuk mengkoreksinya dengan memasukkan nilai-nilai Islam.

Ya, memang bisa dua jalan memang. Yang penting bagi kita adalah substansinya. Tapi *form* (bentuk) juga penting. Seperti shalat mencegah dari yang keji dan mungkar, tapi bukan berarti kalau kita sudah bisa mencegah yang keji dan mungkar di dalam diri kita, tidak usah shalat lagi. Cuma kalau dalam konteks Indonesia memang itu persoalannya politik. Ibaratnya kan begini, kita dihadapkan situasi ketika partai politik, semuanya tidak punya ideologi yang jelas. Ini adalah masalah inte-lektualisme pemikiran. Kalau dalam konteks gerakan ekonomi politik Islam ini, memang apa-apa yang bisa dipakai, saya pikir itu tidak akan diganti dan berubah semuanya. Prinsipnya adalah “*Shariah Compliant*,” kalau memang itu tidak bertentangan dengan Syariah itu tetap bisa dipakai.

Pada dasarnya pendekatan ekonomi politik Islam adalah dua sisi, yang pertama dalam konteks substansi, dan yang berikutnya dalam konteks bentuk luar (*form*). Ini kaitannya dengan strategi perjuangan, kalau misalnya tetap dalam baju yang sekarang, selama masih “*Shariah Compliant*” itu tadi, lalu substansinya diubah sesuai dengan nilai-nilai Syariah, saya melihat itu bisa saja. Yang penting, nilai dasarnya tetap. Kan semua pendapat itu ada nilai-nilai dasarnya, paradigma yang membentuknya. Nah, karena kita juga mempunyai nilai-nilai dasar itu, maka nilai-nilai dasar itulah seharusnya yang kita jadikan acuan.

Kalau kita bicara ekonomi politik, selalu urusannya peran negara, kedudu-

kan dan fungsi pasar, dan masyarakat sendiri. Sebetulnya apa yang spesifik dari ekonomi politik Islam, menyangkut ketiga masalah ini. Sejauh mana sebenarnya batas-batas peran negara terhadap keberadaan bisnis. Sebenarnya sampai sejauh mana, apakah sekedar fasilitator saja seperti yang kita lihat hari ini, ataukah sampai sejauh supervisi. Praktiknya kan di sini, negara sudah terlibat sampai inkubator bisnis. Sekarang pertanyaannya, sejauh mana sebaiknya peran negara dalam sudut pandang ekonomi politik Islam.

Terkait dengan peran negara terhadap ekonomi dalam perspektif Islam, Umer Chapra dalam bukunya “*Islam and the Economic Challenge*” menuliskan bahwa dalam perspektif Islam negara mempunyai kewajiban moral untuk merealisasikan kesejahteraan segenap anggota masyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan private dan sosial, menjaga kereta ekonomi dalam rel yang benar, mencegah terjadinya penyimpangan oleh sekelompok “*powerful vested interests*”. Dalam melakukan perannya negara tetap harus berada dalam lingkup aturan main Syariah dan melalui saluran demokratis dari prinsip konsultasi (Syura). Di sini negara perlu berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan bisnis dan jangan malah mempersulit praktek-praktek ekonomi segenap anggota masyarakat. Misalnya peranan birokrasi dalam melayani kebutuhan masyarakat, seperti kebutuhan lisensi bisnis, izin usaha, izin mendirikan bangunan, sertifikasi tanah dan lain sebagainya. Pemerintah wajib memberikan pelayanan yang baik dan tidak mempersulit masyarakat.

Tetapi, di sisi lain, dalam kerangka mencegah terjadinya penyimpangan ataupun praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat banyak, maka peran negara diperlukan dalam pembuatan regulasi. Misalnya jika ada hasil produksi

yang berdampak negatif bagi masyarakat, misalnya penciptaan kendaraan bermotor yang mempunyai kelemahan dan membahayakan masyarakat ataupun produksi makanan yang tidak 'hygienic', di situ harus ada peran negara.

Kalau kita lihat pemikiran yang berkembang di Barat itu sendiri beberapa tahun belakangan ini, yang bisa kita lihat dari buku-buku para pemikir mereka, khususnya di bidang ekonomi, keuangan dan manajemen, ada tendensi terjadinya konvergensi antara pemikiran modern Barat yang berkembang sekarang dengan nilai-nilai dan aturan-aturan hukum Islam. Misalnya kita bisa melihat perkembangan konsep etika bisnis (*business ethics*), tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), keuangan yang ber-etika (*ethical finance*), tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), serta persoalan polusi dan kerusakan lingkungan (*pollution and environmental degradation*). Pada dasarnya hal ini semua adalah 'in-line' dengan nilai-nilai Islam ataupun *Maqashid Syariah*.

Selain peranan negara di atas, dalam Islam, memang bisnis itu sendiri mempunyai tanggung jawab moral juga. Karena setiap individu juga punya tanggung jawab. Jadi yang divisikan untuk diciptakan adalah 'responsible government', 'responsible business', dan 'responsible individual'. Al-Qur'an berbicara mengenai penggunaan timbangan yang benar bagi para pedagang, di sini implikasinya adalah keadilan dan etika. Di sini pedagang harus mempunyai tanggung jawab moral untuk berlaku 'fair', sedangkan pemerintah perlu memastikan tidak ada pelanggaran terhadap aturan main terkait 'fairness' ini, jika ada pelanggaran maka wajib bagi negara untuk mengambil tindakan koreksi terhadap sesuatu hal yang dapat mempengaruhi rasa keadilan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Hal ini dalam banyak hal juga

dipraktekkan di Barat. Bedanya kalau di Barat, pendekatannya hanya humanisme saja, tapi kalau kita ada pendekatan trans-sidentalnya juga.

Kalau masalah pasar dalam sudut pandang ekonomi politik Islam, bagaimana?

Terkait dengan hal ini, M. Umer Chapra juga berpendapat bahwa Islam mengakui peranan pasar dalam menciptakan alokasi sumber daya yang efisien, tetapi tidak melihat kompetisi sebagai hal yang cukup untuk menjaga kepentingan sosial. Chapra melihat bahwa Islam berusaha untuk mempromosikan persaudaraan manusia, keadilan sosial dan ekonomi, dan kesejahteraan semua melalui peranan integral dari moralitas, mekanisme pasar, keluarga, masyarakat, dan tata kelola yang baik. Tanpa melengkapi sistem mekanisme pasar dengan keputusan-keputusan yang berdasarkan moralitas hanya akan menyebabkan ketidakmerataan yang terus-menerus.

Jadi menurut Chapra walaupun Islam mengakui peranan penting dari pada mekanisme pasar di dalam alokasi dan distribusi sumber daya, ekonomi Islam menekankan bahwa pasar tidak akan dengan sendirinya mampu memenuhi bahkan kebutuhan material dari seluruh manusia. Hal ini karena pasar dapat mendorong penggunaan yang berlebihan dari sumber-sumber daya yang terbatas oleh kelompok yang kaya "at the expense" dari kelompok yang miskin jika di sana terjadi kecenderungan untuk pemenuhan kepentingan diri sendiri yang tanpa batas.

Sehubungan dengan hal di atas maka kita akan menuju kepada peran pemerintah terhadap berfungsinya pasar. Pada esensinya kita melihat bahwa Islam mengakui pentingnya pasar yang bebas, tetapi bukan berarti tidak ada aturan main yang perlu ditegakkan. Terkait dengan aturan main, di sinilah peran pemerin-

tah pada dasarnya, yakni sebagai pihak yang dapat menjamin tidak terjadi penyelewengan ataupun hal-hal lain yang dapat mempengaruhi keadilan ekonomi masyarakat. Jadi dalam Islam memang akan dua elemen yang berperan untuk menjaga pasar agar optimal dalam menjalankan fungsi alokasi dan distribusinya. Pertama, “*moral values*” dari para pelaku pasar itu sendiri. Di sini kita mengenal apa yang disebut ‘*business ethics*.’ Dan yang kedua adalah supervisi dari regulator yang dalam hal ini adalah institusi pemerintah. Di mana pemerintah perlu terus menjamin terlaksananya kondisi pasar yang jauh dari unsur-unsur yang merusak yang diantaranya termasuk ketidakadilan, pemalsuan, penipuan, melanggar kehormatan dan kekayaan pihak lain, dan pelanggaran kontrak.

Kalau misalnya berlaku ekonomi politik Islam, apakah

memungkinkan adanya pasar semacam bursa efek?

Bursa efek akan tetap ada karena pada dasarnya bursa efek adalah satu sarana untuk mempertemukan antara segmen yang mempunyai surplus dan segmen yang defisit. Konsep ideal *capital market* itu juga pada dasarnya adalah satu sarana untuk demokratisasi ekonomi juga. Dalam artian, kepemilikan di dalam perusahaan dibuka.

Yang menjadi persoalan dari Bursa Efek adalah jika banyak transaksi yang bersifat spekulatif dalam perdagangan saham-saham di tingkat ‘*secondary market*.’

Jadi dalam konteks ekonomi politik Islam, bursa efek tetap ada, tetapi regulasi, praktek pasar, jenis dan pengembangan produk yang ada haruslah tidak berten-

tangan dengan Syariah atau dikenal pula dengan konsep “*Shariah Compliant*.” Sekarang ini yang kita miliki adalah masih dalam tahap produk, yakni “*Shariah Compliant Equities*”, yakni saham-saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). DES inilah yang kemudian menjadi dasar dari Jakarta Islamic Index ataupun Indonesia Sharia Stock Index. Hal yang sama juga diciptakan oleh berbagai institusi internasional seperti Dow Jones, Morgan Stanley, Financial Time Stock Exchange (FTSE).

Jadi sebenarnya konsep bursa efek karena itu pada dasarnya membuka peluang untuk masyarakat untuk ikut memiliki.

Dan itu juga adalah salah satu cara untuk menjadi alternatif dari sistem bunga yang kita milik sekarang ini. Karena dalam konteks bursa efek, perusahaan memobilisasi dana langsung dari masyarakat yang

bersifat *equity, pro-fit and loss sharing*, jadi ada aspek mudharabah-nya di situ, dan adanya bursa efek memfasilitasi itu.

Kalau di Indonesia keluar masuknya modal terjadi secara bebas. Namun di Thailand dana yang masuk diatur limit waktunya, ketika masuk dia harus tinggal beberapa bulan baru bisa keluar. Anehnya yang terjadi di Thailand dengan aturan itu tidak membuat uang itu tetap di sana, malah uang tersebut tidak masuk, karena investor melihat itu resikonya tinggi. Bagaimana pendapat Anda?

Kebijakan di atas mengurangi masuknya investor luar karena mereka tidak berani membiarkan dananya harus *stay* dan tidak *liquid*. Ya, itu resiko, kalau kita

Sebenarnya kalau kita melihat model Perbankan Syariah, di-mana di-sana itu ada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Saya berpikir, hal yang sama dapat juga kita lakukan ketika kita bicara pengaturan kebijakan ekonomi negara berdasarkan Syariah. Di-sini konsep yang sama dapat pula di-terap-kan, misal-nya di Kementerian-Kementerian terkait akan ada pula Dewan-Dewan Pengawas Syariah.

telah membuat sebuah kebijakan yang kita anggap “*for the best interest of the country*”, kita harus siap menghadapi implikasinya, dampaknya adalah nomor dua, walaupun kebijakan itu tetap dapat direview apakah membawa kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat atau tidak.

Sekarang seperti kita di Indonesia, yang memberikan kebebasan penuh terhadap arus masuk dan keluarnya modal, yang berdampak terhadap keluar masuknya ‘*hot money*’ secara cepat, apa kurang berbahaya juga? Persoalannya adalah, kalau lagi ada gejala di luar negeri, kita kerap kena dampaknya juga. Misalnya ketika Amerika mengalami krisis keuangan di tahun 2008/2009, saham-saham kita ikut jatuh juga. Hal ini karena “*portfolio investment*” di Bursa Efek kita adalah sangat ‘*volatile*’, cepat masuk dan cepat pula keluarnya.

Untuk mengurangi gejala pasar yang tiba-tiba itu, kalau saya berpikir, seperti ini memang harus ada ketentuan ‘*stay period*.’ Kalau akhirnya orang takut dan tidak masuk, itu masalah resiko. Tetapi obyektif dasar dari kebijakan yang seperti itu adalah mengurangi volatilitas yang kurang sehat dan juga mencegah motivasi spekulasi jangka pendek. Walaupun itu tadi, kalau kita terapkan ‘*lock-up period*’ dengan menerapkan aturan-aturan minimum investasi untuk beberapa bulan, tentunya nanti ada dampaknya, anggaplah itu bagian dari resiko sebuah keputusan. Tinggal kita kaji saja itu manfaat dan mudharatnya.

Lalu misalkan kebijakan ‘*lock-up period*’ itu tadi menimbulkan persoalan kepada bisnis-bisnis yang berada di dalam negeri, bagaimana?

Itu sebenarnya kekhawatiran kita saja. Di sini sebenarnya kita harus bedakan dua macam tipe investor. Pertama, adalah investor yang orientasi investasinya seperti ‘*farmer*’, investor seperti itu berpikinya *long term*, dia masuk ke *company* bukan

hanya mau *profit taking*, walaupun kita akui ini tetap merupakan hal penting bagi investor. Tetapi ini bukan satu-satunya alasan bagi mereka. Mereka ingin tumbuh bersama *company* yang dimasukinya. Yang lainnya adalah yang seperti ‘*hunter*’, yang berpikinya *short-term*, hanya sekedar ingin mendapatkan ‘*quick gain*’ atau ‘*instant profit*’. Indonesia membutuhkan jenis investor yang pertama itu tadi, karena mereka masuk ke *company* bukan sekedar mau cari profit taking lalu keluar lagi, tapi *stay*. Sistem yang mensyarakatkan “*minimum stay*” itu justru akan menjadi seleksi alam untuk mencari investor-investor yang mempunyai orientasi jangka panjang, orang yang serius pasti masuk. Mereka akan mempelajari dulu, seperti apakah manajemennya, baik? Atau mau melihat bagaimana pertumbuhan perusahaan itu, kalau mereka yakin dan ‘*confident*’ tentunya mereka akan masuk. Toh, pada akhirnya kita tidak terlalu membutuhkan investor yang orientasinya instant dan memang niatnya *profit taking* saja, yang dampaknya justru buruk bagi ekonomi secara keseluruhan. Misalnya ada *company* yang dimasuki oleh ‘*portfolio investor*’ hanya untuk 2-3 bulan, lalu ditarik, jika jumlahnya besar, harga sahamnya akan drop, ketika terjadi yang seperti itu pihak yang di dalam negeri rugi juga, padahal operasi internal perusahaan biasa-biasa saja.

Tapi praktik semacam itu tidak bisa diatur, ya?

Dalam konteks bursa efek yang sekarang, tidak bisa. Kecuali di lock itu tadi, ada aturan minimum ‘*stay*’, misalnya enam bulan, itu akan bisa mengurangi volatilitas. Sebetulnya konsep dasar *capital market* bukan untuk spekulasi, itu eksisnya saja. Karena tidak ada aturan baku mengenai itu.

Bagaimana caranya Indonesia ini dapat menerapkan ekonomi politik berbasiskan Islam?

Dalam waktu yang lama sejak sekitar kejatuhan Khilafah Usmaniyah, banyak negara Muslim termasuk Indonesia tidak menerapkan sistem yang berdasarkan Syariah ataupun Paradigma Islam. Untuk kesana perlu kombinasi antara kerja-kerja intelektual dan politik. Kita akan perlu membahas konsep pembangunan, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, perpajakan dan lain sebagainya dalam konteks paradigma dan Syariah Islam. Ini adalah kerja besar dalam kerangka pembangunan peradaban baru sebuah bangsa. Bisa dimulai dari kerja-kerja intelektual yang kemudian diperjuangkan oleh partai-partai yang berasaskan Islam ataupun setiap politisi Muslim yang sadar akan peran peradabannya di partai manapun dia berada. Atau dimulai dari perjuangan politik, tetapi untuk yang ini dibutuhkan *'ruling party'* yang kuat untuk mengimplementasikannya. Persoalannya sekarang apakah ada partai politik yang siap untuk memperjuangkan ini? Jika tidak, mungkin harus dimulai dulu dengan kerja-kerja intelektual.

Sebenarnya kalau kita melihat model Perbankan Syariah, dimana di sana itu terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Saya berpikir, hal yang sama dapat juga kita lakukan ketika kita bicara pengaturan kebijakan ekonomi negara berdasarkan Syariah. Di sini konsep yang sama dapat pula diterapkan, misalnya di Kementerian-Kementerian terkait akan ada pula Dewan-Dewan Pengawas Syariah. Makanya ke depan, pemahaman yang akan bisa menggabungkan antara pendekatan Syariah dan pendekatan ekonomi politik secara umum adalah menjadi sangat penting. Kalau kita lihat sekarang, misalnya di bidang keuangan dan perbankan, banyak aturan lahir dari fatwa-fatwa baru. Karena orang harus bicara masalah sukuk, bicara tipe-tipe produk keuangan syariah, yang mungkin belum diatur sebelumnya. Kalau kita lihat Fiqh Academy OKI, mereka banyak mengeluarkan fatwa-fatwa yang

mengatur hal-hal yang belum diatur sebelumnya. Nah, seperti itu akan dinamis, selama kalau pembahasannya tetap berpegang kepada nilai-nilai fundamental dari Islam itu sendiri. Ada dasarnya.

Sudah sejak beberapa waktu belakangan ini orang sudah mulai belajar fiqh. Maksudnya fiqh yang sesuai dengan konteks Indonesia. Jadi Indonesia ini punya ciri khas dalam mempraktikkan ibadah muamalah. Setidaknya rujukannya sudah ada. Bagaimana pendapat Anda?

Itu bisa saja terjadi asalkan dasar Syariahnya kuat. Karena pada dasarnya fiqh akan terus dapat berubah karena itu adalah hasil pemikiran para ulama terdahulu yang mungkin dalam beberapa hal sudah tidak kontekstual lagi dengan kondisi sekarang, walaupun tetap dapat digunakan sebagai salah satu rujukan penting. Dalam satu diskusi di Universitas Bakrie, ada pertanyaan begini kepada saya: Bagaimana suatu hukum yang yang dibikin di zaman abad 13-14 bisa di-terapkan di abad 21? Pada saat itu saya menjawab bahwa pada dasarnya itulah pentingnya Ijtihad baru. Tapi soal Ijtihad itu ada ketentuannya, yang penting sumber-sumber yang tidak dapat dirubah seperti al-Qur'an dan Sunnah Nabi besar kita Muhammad SAW tetap sebagai rujukan utama.

Untuk kasus Arab Saudi atau Iran yang dikenal kuat menerapkan sistem ekonomi Islam, apakah di sana terdapat juga bursa efek seperti halnya di Indonesia?

Di kedua negara itu ada bursa efeknya. Di Saudi, pemerintah mengesahkan pembentukan Bursa Efek Saudi (*the Saudi Stock Exchange Company*) atau yang dikenal dengan Tadawul pada 19 Maret 2007. Sedangkan Iran, Bursa Efek Tehran (*Tehran Stock Exchange*) memulai operasinya pada 4 February 1967, dan pada tahun 1983, hukum mengenai perbankan tanpa bunga

disahkan dan perdagangan obligasi yang mengandung bunga ditiadakan.

Dalam konteks perbankan Syariah sekarang, ada pendapat yang menyatakan bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan perbankan Syariah tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh perbankan konvensional. Bagaimana menurut Anda?

Ada beberapa hal di sini yang perlu diperhatikan. Dari sisi perjanjian atau akad jelas beda, karena dalam Perbankan Syariah pada dasarnya bank tidak meminjamkan uang tetapi melakukan jual beli (*Murabahah*), sewa beli (*Ijarah*), pembiayaan konstruksi (*Istishna*), bagi hasil (*Mudharabah* dan/atau *Musyarakah*) dan lain sebagainya. Dari berbagai pembiayaan Syariah ini pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yakni *debt financing* (*Murabahah*, *Ijarah*, *Istishna*, dan *Salam*) dan *equity financing* (*Mudharabah* dan *Musyarakah*). Yang banyak dilakukan oleh Perbankan Syariah di Indonesia dan dunia pada umumnya adalah *debt financing*, inilah yang terkadang hasil akhirnya terlihat sama dengan Perbankan Konvensional. Yang belum begitu dapat dilakukan dalam konteks Perbankan Syariah sekarang adalah model *equity financing*. Hal ini terkait regulasi juga karena Perbankan Syariah sekarang ini berada di bawah aturan regulasi konvensional yang mewajibkan Bank membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) untuk aktiva produktif dan non-produktif (yang bermasalah). Untuk pembiayaan-pembiayaan bermasalah itu kita harus kasih pencadangan (PPA). Terkait dengan hal ini masalah jaminan menjadi penting. Tergantung tingkat kolektibilitas yang ada, pencadangan yang harus diberikan oleh bank adalah persentase dari aktiva yang bermasalah dikurangi jaminan yang ada. Jadi jika tidak ada jaminan pencadangan yang diberikan bisa menjadi sangat besar. Dalam konteks seperti ini maka akan sulit untuk melaku-

kan 'real mudharabah' bagi perbankan Syariah. Di samping itu peraturan BI yang sekarang juga tidak membolehkan perbankan untuk memiliki saham di perusahaan yang bukan lembaga keuangan. Dalam konteks sekarang ini justru yang bisa melakukan *equity financing* adalah perusahaan bukan bank seperti *private equity* ataupun *venture capital*. Jadi memang secara teoritis untuk Perbankan Syariah benar-benar dapat melakukan *equity financing* perlu perubahan bukan hanya bisnis model dari perbankan Syariah yang ada sekarang ini tetapi juga menyangkut regulasi terkait dengan perbankan secara umum.

Apakah sistem kapitalisme seperti Amerika Serikat menciptakan hal yang baik juga bagi masyarakat? Bagaimana pendapat Anda?

Banyak hal-hal yang positif terkait dengan sistem kapitalisme di Amerika Serikat walaupun juga banyak kelemahan-kelemahannya. Tetapi perlu dicatat di sini bahwa ketika kita berbicara sistem kapitalisme di Amerika, ini adalah 'modern capitalism' yang berbeda dengan 'old or primitive capitalism' pada zamannya Karl Marx dahulu. Bagaimana pun kapitalismenya mereka, peranan pemerintah tetap penting dalam menjaga kelompok-kelompok yang vulnerable di dalam masyarakat. Seperti misalnya pada waktu krisis keuangan di tahun 2008/2009 yang lalu, pemerintah memberikan jaminan sosial kepada para karyawan yang terkena 'lay-off'; mereka diberikan tunjangan sekitar 70% dari gaji terakhir yang diterimanya dalam jangka waktu 18 bulan. Hal lain adalah mereka juga mempunyai skema untuk memberikan tunjangan perumahan kepada *single-parent family*, biasanya untuk seorang Ibu yang tidak ada suaminya dan mempunyai anak-anak, Pemerintah memberikan tunjangan perumahan kepada mereka. Jaminan sosial untuk orang-orang yang telah pensiun juga baik selama mereka patuh membayar pajak semasa mudanya. Se-

cara umum pendidikan publik diberikan secara gratis, *public service* juga berfungsi dengan baik, juga *rule of law*, rumah sakit wajib menerima pasien yang sakit *by law* tanpa menanyakan dulu status keuangan dari keluarga pasien. Riset-riset, dunia pendidikan, inovasi, bisnis semuanya berkembang dengan baik. Ini mungkin adalah beberapa hal yang positif dari Kapitalisme di Amerika, memang intinya adalah kapitalisme mereka didukung oleh justice system yang baik, birokrasi yang melayani, aturan-aturan yang *simple* dan *straitforward* dan juga jaringan pengaman sosial yang baik.

Adakah anda melihat ekonomi politik Islam berbeda dengan ekonomi politik lainnya?

Secara filosofis tentunya akan berbeda dengan pendekatan-pendekatan ekonomi politik sekuler. Karena dalam pendekatan ekonomi politik Islam aspek transedental akan juga menjadi penting. Tetapi dalam tataran hubungan kemanusiaan dan institusional, aplikasi ekonomi politik Islam akan dapat mengambil hal-hal yang positif dari apa-apa yang telah diterapkan di negara-negara maju sekarang ini. Bedanya hanya jika di negara-negara maju sekarang pendekatannya lebih ke humanisme, sedangkan kita di dunia Muslim adalah pendekatan Tauhid, yang sebenarnya humanisme akan menjadi bagian pentingnya juga karena kita mengetahui bahwa penekanan Islam terhadap kepedulian kepada sesama adalah besar. Mulai dari konsepsi zakat, infaq, sedeqah, dan waqaf yang merupakan refleksi dari spirit Islam terhadap keadilan sosial dan ekonomi sampai dengan penentangan al-Qur'an yang tegas terhadap kekayaan yang hanya berputar di sekelompok kecil masyarakat. Cuma kekuatan filosofis ekonomi politik Islam nantinya adalah seluruh perbuatan kebaikan universal yang seorang Muslim lakukan adalah bukan sekedar kepedulian kepada sesama tetapi juga aspek penting

dari belief seseorang terhadap konsepsi Tauhid dan keselamatan di dalam kehidupan yang berikutnya, di akhirat kelak.

Bisa tolong Anda jelaskan secara lebih konkrit titik-titik persamaan dan perbedaan antara konsepsi ekonomi politik Islam dan ekonomi politik di negara-negara maju sekerang ini, khususnya di negara-negara Barat?

Beberapa kesamaan antara visi ekonomi politik Islam dan apa yang ada di negara-negara maju sekarang ini diantaranya adalah penegakan pemerintahan yang bersih, birokrasi yang sederhana dan melayani, penegakan hukum, berfungsinya pranata-pranata keadilan di masyarakat seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, akses kependidikan dan kesehatan secara meluas, berfungsinya jaminan pengaman sosial, dihargainya hak-hak konsumen, mekanisme pajak yang akuntabel dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, lingkungan yang kondusif bagi bisnis khususnya pengusaha-pengusaha kecil dan menengah, penghargaan yang tinggi terhadap martabat kemanusiaan dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Inilah kurang lebih beberapa persamaan nantinya antara aplikasi ekonomi politik Islam dan apa yang telah ada di negara-negara maju sekarang ini.

Sedangkan perbedaan yang ada di antaranya adalah kemewahan dan/atau materialisme yang berlebihan mungkin akan dibatasi karena itu akan menyinggung rasa keadilan kemanusiaan secara global, atau paling tidak ada proses yang akan meng-disinsentif gaya hidup super mewah. Di sini adalah bagaimana diciptakan suatu kondisi yang dapat mengontrol keserakahan (*greed control*). Sebagai contoh sewaktu saya hidup di New York dulu saya mendapati nilai sewa beberapa apartemen yang bisa mencapai US\$ 20.000 atau dengan harga puluhan juta dollar. Di sisi lain

banyak apartemen yang sudah cukup baik dengan harga sekitar US\$ 1,000. Lalu saya terkadang berpikir apakah manusia membutuhkan kemewahan sedemikian rupa? Atau contoh yang lain saya baru mengunjungi Las Vegas di sana kita bisa dapati hotel-hotel mewah di-daerah utama Las Vegas dengan berbagai macam arsitektur super mewah mulai dari model Kerajaan Romawi, Mesir Kuno, gaya Italia, gaya puri-puri Inggris masa lalu, lalu saya berpikir apakah hal ini semua tidak terlalu 'excessive'? Apakah manusia membutuhkan kehidupan yang seperti itu? Bukankah keadilan ekonomi dunia bisa akan menjadi lebih baik jika manusia bisa cukup dengan hal-hal *comfortable* dan *convenient* dalam hal tempat tinggal dan hiburan tanpa terlalu menuruti keinginan yang berlebihan? Bila hedonisme dan materialisme yang sedemikian rupa dapat dikontrol, tentunya tidak akan menimbulkan ketimpangan dalam suatu negara ataupun antar negara seperti halnya terminologi Utara-Selatan. Dunia tentunya akan dapat menjadi tempat yang lebih baik dalam segala hal, baik dari sisi keadilan ekonomi dan sosial, lingkungan hidup, atau kerusakan ekologi.

Tapi kemewahan yang seperti itu disana tentunya secara hukum tidak bermasalah, bukan?

Benar memang tidak bermasalah selama itu didapatkan secara legal dan mereka membayar pajak untuk itu. Tetapi kedepannya, menambahkan apa yang saya katakan yang di atas, di sinilah titik perbedaan antara ekonomi politik Islam dan sekuler, dan di sinilah mengapa kita bisa optimis bahwa filosofi ekonomi politik Islam dapat memberikan sesuatu yang lebih baik bagi kemanusiaan dan alam semesta.

Akhirnya, bisa diuraikan lebih jauh terkait filosofi ekonomi politik Islam di atas dalam kaitannya dengan kemanusiaan?

Hal ini terkait dengan proses pencarian

sistem-sistem atau pemikiran-pemikiran alternatif di Barat sendiri. Mungkin pada akhirnya orang Barat itu sendiri akan lebih tertarik dengan spirit dari ekonomi politik Islam karena pada hakekatnya mereka pun masih dalam proses 'ongoing search for meaning.' Mereka pun mulai bosan dan kritis terhadap hedonisme dan materialisme yang berlebihan, pencarian popularitas dan lain sebagainya, mereka berusaha mencari sesuatu yang lebih substantif, lebih manusiawi, lebih etis, dan lebih peduli. Ini dapat terlihat di antaranya dari buku-buku semacam ini: *the Desecularization of the World*; *Good Value: Reflections on Money, Morality, and an Uncertain World*; *Necessary Revolution: Working Together to Create a Sustainable World* atau *the Support Economy: Why Corporation Are Failing Individuals and the Next Episode of Capitalism*; *Greatness*; *Built to Last, the Crisis of Global Capitalism* dan masih banyak lagi.

Dalam proses membaca literatur-literatur karangan sarjana Barat tersebut baik di bidang filosofi, ekonomi, bisnis, dan manajemen, saya merasakan bahwa ada hal-hal yang menjadi 'common ground' antara Islam dan pencarian pemikiran mereka. Saya terus terang, keyakinan saya terhadap pengembangan paradigma Islam yang dalam hal ini ekonomi politik Islam, justru semakin diperkuat melalui proses membaca banyak buku-buku Barat itu sendiri. Kita kan belajar ajaran kita, nilai-nilai kita sejak kecil, lalu ketika saya banyak membaca buku-buku Barat abad 21 ini, lalu saya merasakan bahwa ada proses konvergensi dengan nilai-nilai yang telah kita yakini.

Terima kasih atas interview yang menarik ini. Sukses selalu.